

LAMPIRAN

Lampiran I

Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA 2016-2021**

dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (b) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan; (c) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata; (d) peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan.

10) PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN

Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, pengamanan, dan aktivitas lintas batas Wilayah Negara secara terpadu di Wilayah Sulawesi, dilakukan melalui:

- a. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane (termasuk di Pulau Marore dan/atau Pulau Miangas);
- b. Pembenahan aktivitas lintas batas di pintu-pintu alternatif (ilegal) di kawasan perbatasan Sulawesi;
- c. Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe;
- d. Peningkatan upaya perundingan dalam penetapan dan penegakan batas wilayah negara RI- Philipina;
- e. Peningkatan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi,

- e. Peningkatan kapasitas tim perunding dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (pengambilan keputusan);
- f. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, Pulau Marampit dan Pulau Kakarotan dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan;
- g. Penyelesaian status kewarganegaraan masyarakat Philipina-Sangir (Phisang);
- h. Penguatan fungsi pengamanan perbatasan wilayah laut, baik penyediaan alutsista, non alutsista dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kedaulatan, khususnya perbatasan wilayah laut RI-Philipina;
- i. Pembentukan kerjasama patroli pertahanan dan keamanan batas wilayah Negara RI- Philipina;
- j. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawaluso, Pulau Kawio, Pulau Kakarotan, dan Pulau Marampit dengan pendekatan ekonomi, keamanan dan lingkungan;
- k. Sosialisasi batas wilayah laut negara RI- Philipina kepada masyarakat perbatasan Wilayah Sulawesi;

Pengembangan ekonomi lokal secara terpadu pada kawasan perbatasan negara di Wilayah Sulawesi, dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dan kelautan untuk ekspor melalui pengembangan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pemasaran

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSISULAWESI UTARA 2016-2021



di PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, dan gugus pulau perbatasan di Sangihe dan Talaud (termasuk Miangas dan Marore) yang berorientasi pasar kepada negara Filipina, termasuk yang mendesak yaitu penyediaan Kapal Tangkap 30 GT ; serta Peningkatankerjasama investasi lintas batas negara produk unggulan kawasan perbatasan, khususnya dengan negara Filipina; Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan untuk mencukupi kebutuhan lokal maupun lintas negara; serta Pengembangan program transmigrasi di kawasan perbatasan dalam bentuk Kota Terpadu Mandiri di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud;Peningkatan nilai potensi pariwisata bahari dan budaya melalui pengelolaan pariwisata yang optimal (promosi dalam dan lintas negara dan penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata) di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud; Mengembangkan pusat perdagangan skala internasional, nasional, dan regional berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara Filipina serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane; serta pengembangan balai-balai latihan kerja berbasis komoditas lokal yang berorientasi pasar ke negara tetangga di kawasan perbatasan Sangihe dan Talaud.

Penguatan Konektivitas dan Sislognas melalui pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di gugus pulau perbatasan Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe; Mengembangkan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan industri perikanan; Penjaminan ketersediaan logistic termasuk BBM, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya perhatian

Penguatan Konektivitas dan Sislognas melalui pengembangan dermaga keperintisan pada pulau-pulau kecil terluar berpenduduk di gugus pulau perbatasan Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe; Mengembangkan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan industri perikanan; Penjaminan ketersediaan logistic termasuk BBM, khususnya untuk pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, khususnya perhatian terhadap Pulau Miangas dan Pulau Marore; Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik untuk meningkatkan distribusi hulu-hilir perdagangan antar negara, khususnya di Lokasi Prioritas yang memiliki aktifitas perdagangan tinggi; serta Pengembangan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, khususnya di PKSN Sangihe dan PKSN Talaud.

Lampiran II

Undangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) zona maritim tengah untuk melakukan rapat kordinasi

		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA SEKRETARIAT DAERAH JALAN 17 AGUSTUS NOMOR 69 TELEPON 865559, 862701 FAX 860420 http://www.sulut.go.id E-Mail sulut@sulut.go.id MANADO 95119	
		Manado, 5 Mei 2017	
		Kepada	
Nomor	: 005 / 1290 / Sekr	Yth:	KEPALA BAKAMLA RI ZONA MARITIM TENGAH
Sifat	: Penting		
Lampiran	: -		
Perihal	: Undangan	di -	Tempat
<p>Dalam rangka meningkatkan sinergitas pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka bersama ini dengan hormat diundang dalam rapat koordinasi yang akan dilaksanakan pada :</p> <p>Hari : Senin Tanggal : 8 Mei 2017 Waktu : 14.00 Wita Tempat : Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Utara Acara : 1. Paparan Kakanwil BPN Prov. Sulut Menyangkut Permasalahan Pertanahan di Sulawesi Utara; 2. Pembahasan Kondisi Stabilitas Keamanan Daerah Sulut.</p> <p>Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.</p>			
		a.n. GUBERNUR SULAWESI UTARA SEKRETARIS DAERAH  EDWIN H. SILANGEN, SE, MS. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611022 198803 1 010	
<p><i>Tembusan Yth.:</i></p>			

Lampiran III

Laporan Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Utara pembahasan RPJMD
2016-2021

LAPORAN

PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

**pembahas RANCANGAN awal RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAMENENGAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

TAHUN 2016-2021

SYALOOm...

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN,

ASALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH...

OM SWATYASTU...

NAMO BUDAYA...

YANG TERHORMAT :

- BAPAK GUBERNUR SULAWESI UTARA;
- BAPAK WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA;
- para anggota FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
- PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA;
- sekretaris daerah provinsi sulawesi utara
- PARA PEJABAT eselon ii, iii dan iv DI JAJARAN pemerintah provinsi sulawesi utAra;
- kepala bpk perwakilan prov. sulut;
- KEPALA PERWAKILAN bpkp PROV. SULUT;

- kepala bakorkamla prov. sulut;
- PARA INSAN PERS, MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK;
- UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA ;

marilah kita mempersembahkan puji dan syukur ke hadirat tuhan yang maha kuasa, karena atas perkenan, kasih dan setia-nya, yang selalu menjaga dan memberikan berkat serta nafas kehidupan, sehingga kita dapat hadir ditempat ini, untuk MENGIKUTI **RAPAT PARIPURNA DPRD provinsi sulawesi utara dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal rpjmd provinsi sulawesi utara 2016-2021** DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, perkenankan kami PANITIA KHUSUS Pembahas rancangan awal rpjmd provinsi sulawesi utara tahun 2016-2021, untuk MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN awal RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (rpjmd) PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021, yang telah kami bahas dengan penuh kesungguhan baik **mengkritisi..., debattebel..., menanggapi...,** bahkan **memberikan masukan-masukan...,** demi untuk kemajuan sulawesi utara kedepan, **menjadi semakin hebat...,** dan mampu bersaing menjadi terdepan di kawasan indonesia timur, sehingga visi dan misi gubernur sulawesi utara dapat **terpresentasikan...** dan menjadi **prime priority** di dalam penerapan rancangan awal rpjmd ini, untuk kesejahteraan masyarakat bumi nyiur melambai dari miangas sampai PINOGALUMAN.

adapun perlu kami jelaskan sebelumnya, UNTUK MEMUDAHKAN RAPAT PARIPURNA DPRD MENGIKUTI HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DPRD pembahas rancangan awal rpjmd INI, adalah, LAPORAN DISUSUN DENGAN SISTIMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II	MEKANISME PEMBAHASAN
BAB III	HASIL PEMBAHASAN
BAB IV	KESIMPULAN/SARAN
BAB V	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

ADAPUN MENJADI DASAR HUKUM PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MEMBAHAS RANCANGAN AWALRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021, INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
3. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA pemerintah PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.
4. peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perncana pembangunan daerah.
5. SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TANGGAL 16 juni 2016 TENTANG pimpinan panitia khusus DPRD PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2016-2021.

B. KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN AWAL
RPJMD PROVINSI SULUT TAHUN 2016-2021

1.	ANDREI ANGOUW	KOORDINATOR
2.	Drs. STEFANUS VREEKE RUNTU, M.Si	KOORDINATOR
3.	MARTHEN MANUEL MANOPO, SH	KOORDINATOR
4.	WENNY LUMENTUT, SE	KOORDINATOR
5.	Dra. ADRIANA C. DONDOKAMBAY, M.Si	KETUA
6.	PRICILLA CINDY WURANGIAN, MBA	WAKIL KETUA
7.	JAMES KARINDA, SH, MH	SEKRETARIS
8.	TEDDY KUMAAT, SE	ANGGOTA
9.	Dr. IVONE D. BENTELU	ANGGOTA
10.	JENNY MARHO MUMEK	ANGGOTA
11.	Drs. EDDYSON M. MASENGI, MM	ANGGOTA
12.	KRISTOVORUS D. PALINGGI, SE	ANGGOTA
13.	EDWIN YERRY LONTOH	ANGGOTA
14.	JUDDY F. MONIAGA, SE	ANGGOTA
15.	Drs. FERDINAND N. MEWENGGANG, MM	ANGGOTA
16.	HI. AYUB ALI, SE	ANGGOTA
17.	HI. AMIR LIPUTO, SH	ANGGOTA
18.	FELLY RUNTUWENE, SE	ANGGOTA
19.	BART Y. K. SENDUK	ANGGOTA
20.	B. MONONUTU, SH	SEKRETARIS DPRD

PANITIA KHUSUS DIBANTU OLEH STAF SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SULAWESI UTARA.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

PENYUSUNAN LAPORAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN GAMBARAN SEJAUHMANA PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS PANITIA KHUSUS DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021, DENGAN TUJUAN SEBAGAI BAHAN MASUKAN BAGI PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 -2021.

BAB II

MEKANISME PEMBAHASAN

UNTUK MEMPEROLEH HASIL YANG MAKSIMAL DISEPAKATI OLEH PANITIA KHUSUS DPRD BERSAMA PIHAK EKSEKUTIF BAHWA MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021, INI MELIPUTI :

1. RAPAT AWAL PANITIA KHUSUS, DAN DILANJUTKAN DENGAN SCHEDULE PEMBAHASAN DAN AGENDA PELAKSANAAN RAPAT TEKNIS PEMBAHASAN.
2. RAPAT PANITIA KHUSUS DENGAN TIM PENYUSUN RPJMD DALAM RANGKA MEMBAHAS DAN MENDENGARKAN PENJELASAN UMUM RPJMD PROV. SULUT 2016-2021, DARI BAB I (SATU) SAMPAI BAB X (SEPULUH) BERSERTA DENGAN 97 PROGRAM STRATEGIS SESUAI DENGAN VISI DAN MISI GUBERNUR SULAWESI UTARA. TERMASUK

DENGAN PENJELASAN DARIPADA POKJA PENYUSUN RPJMD TIM AHLI EKONOMI.

3. LANJUTAN RAPAT PANITIA KHUSUS DENGAN TIM PENYUSUN RPJMD DALAM RANGKA MEMBAHAS DAN MENDENGARKAN PENJELASAN UMUM RPJMD PROV. SULUT 2016-2021, DARI BAB I (SATU) SAMPAI BAB X (SEPULUH) BESERTA DENGAN 97 PROGRAM PRIORITAS SESUAI DENGAN VISI DAN MISI GUBERNUR SULAWESI UTARA, TERMASUK DENGAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH ***OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN (ODSK)*** PROVINSI SULUT 2016-2021.
4. RAPAT PANITIA KHUSUS DENGAN TIM PENYUSUN DAN KEPALA SKPD DALAM RANGKA FINALISASI TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021.

ADAPUN, DALAM SETIAP PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS, MAKA UNTUK RANCANGAN AWAL RPJMD INI, PANSUS TELAH BERUPAYA ***MAKSIMAL...MENYAMAKAN...,MENYELARASKAN...,VISI, MISI, PERSEPSI DAN INTERPRETASI*** DENGAN PIHAK EKSEKUTIF DENGAN PEMBAHASAN BERBAGAI PROGRAM PRIORITAS DAN TURUNANNYA, DENGAN MEMBANDINGKAN DATA, FAKTA, PEMIKIRAN YANG SOLID MEMBANGUN MEMBAHAS DENGAN TELITI ADA DENGAN HARAPAN AGAR PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD INI,DAPAT MEMENUHI MAKSUD PEMBUATANNYA.

OLEH SEBAB ITU, PANSUS SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD YANG DITUGASI UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN AWAL RPJMD INI INI TELAH BERUPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN MEMAHAMI DAN MENGAKOMODASI ASPIRASI SERTA PIKIRAN-PIKIRAN YANG BERKEMBANG UNTUK KEMAJUAN SULAWESI UTARA SEKARANG DAN KEDEPAN NANTI, DENGAN

BERBAGAI MASUKAN UNTUK PENYEMPURNAAN PROGRAM PROGRAM PRIORITAS RPJMD, ANTARA LAIN :

1. PROYEKSI KEDEPAN DALAM PEMBAHASAN RPJMD BAB III TENTANG KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN KHUSUSNYA UNTUK PENDAPATAN ASLI DAERAH, DIMANA UNTUK PROYEKSI 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021, PANSUS MENILAI PERLU UNTUK DINAIKAN BAIK DARI PAJAK, RETRIBUSI, PENERIMAAN LAIN LAIN YANG SAH DAN DEVIDENT BANK SULUTGO UNTUK DIHARAPKAN DINAIKAN LAGI MENGGINGAT PEMBIAYAAN 97 PROGRAM PRIORITAS AKAN MEMAKAI DANA TIDAK SEDIKIT, KHUSUS PERTUMBUHAN EKONOMI SULAWESI UTARA DIPENGARUHI OLEH PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK ITU PERLU DI PIKIRKAN TERHADAP PELAKSANAANNYA DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN MEGA PROYEK SEPERTI JALAN TOL, KEK, BMUD DAN LAIN LAIN MAMPU MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN MENAIKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN MEMBUAT LOMPATAN-LOMPATAN EKONOMI BAGI SULAWES UTARA.
2. DI BIDANG KESEHATAN PERLU DINAIKAN TIPE RUMAH SAKIT NOONGAN DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI RUMAH SAKIT REHABILITASI BAGI PENYALAGUNAAN NARKOBA DAN DILENGKAPI DENGAN BERBAGAI FASILITASI KELENGKAPANNYA, TERMASUK JUGA AKREDITASI RUMAH SAKIT UMUM SETIAP TAHUNNYA SEHINGGA PADA TAHUN 2021 SEMUA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DI PROVINSI MAUPUN KABUPATEN/ KOTA TELAH TERAKREDITASI. DAN PERLUNYA PENGEMBANGAN SDM DAN PROGRAM BEASISWA BAGI PARA DOKTER UNTUK DI KAB/KOTA YANG DI SERTAI DENGAN MOU SELESAI SEKOLAH KEMBALI KEDAERAHNYA.
3. DI BIDANG PENDIDIKAN GUNA MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA KHUSUSNYA DI SULAWESI UTARA INI BIAYA PENDIDIKAN UNTUK SISWA SD DAN SMP DI SEKOLAH PEMERINTAH UNTUK TIDAK

ADA ALAGI PUNGUTAN, SEMUANYA DI TANGGUNG OLEH APBD KAB/KOTA, DEMIKIAN JUGA BERLAKU UNTUK SISWA SMA/SMK ATAU SEDERAJAT MILIK PEMERINTAH DITANGGUNG PENUH OLEH PEMERINTAH PROVINSI DAN 1000 BEA SISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU YANG AKAN KULIAH.

4. PEMBANGUNAN JALAN JANGAN HANYA TERFOKUS DI KABUPATEN/KOTA DI LUAR KOTA MANADO, DIPERLUKAN PEMERATAAN DALAM PEMBANGUNAN SEPERTI DI MINAHASA UTARA TERKAIT DENGAN PEMBUAT TROTOAR JALAN KARENA SEPANJANG JALAN MAUMBI -WATUDAMBO TERMASUK JALUR UTAMA MANADO MENUJU BITUNG DAN MASIH JALAN PROVINSI, TERMASUK PEMASANGAN LAMPU JALAN DI JALAN JALAN UTAMA UNTUK MENCEGAH/ MENGURANGI KRIMINALITAS. BEGITU JUGA JALAN DI MITRA DAN MINSER UNTUK DIPERHATIKAN.
5. UNTUK SOSIAL KEMASYARAKATAN KEBERADAAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO, UNTUK DI PERHATIKAN.
6. PANITIA KHUSUS JUGA TELAH BERUSAHA MENYERAP DAN MENGAJAI MASALAH-MASALAH KEDEPAN YANG BERKEMBANG PADA RAPAT-RAPAT PANSUS SECARA CERMAT DAN TELITI, MENGAJAI RANCANGAN AWAL RPJMD INI DENGAN BERBAGAI PROGRAM UNTUK MENJADIKAN SULAWESI UTARA HEBAT DI MATA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DENGAN BERBAGAI INOVASI PROGRAM YANG TERBAIK SEHINGGA **MASUKAN INI DAN YANG MASUKAN YANG DISEBUTKAN DALAM RAPAT** DAPAT DI AKOMODIR DAN DI HARAPKAN MEMBERIKAN NUANSAN DAN MENJADI REL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKAT DI DAERAH SULAWESI UTARA YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI.

ADAPUN PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021 INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. SELASA, 21 JUNI 2016, MENGADAKAN PEMBAHASAN SECARA INTERNAL PANSUS.
2. RABU, 22 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN JUMAT 24 JUNI 2016, PEMBAHASAN BAB DEMI BAB RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021. DENGAN PIHAK PANITIA KHUSUS DAN PIHAK EKSEKUTIF DAN TIM PENYUSUN SERTA KEPALA SKPD PROV. SULUT.
3. KAMIS, 23 JUNI 2016, LANJUTAN RAPAT DENGAN EKSEKUTIF SERTA TIM PENYUSUN DILANJUTKAN RAPAT INTERNAL PANSUS DAN PERTEMUAN PANSUS PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RPJMD DENGAN GUBERNUR SULAWESI UTARA.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. PADA HAKEKATNYA HASIL PEMBAHASAN DALAM BEBERAPA KALI PELAKSANAAN RAPAT YANG AMAT MEMAKAN WAKTU DAN TENAGA DIMANA KITA HARUS MENYESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PANITIA KHUSUS DPRD BERSAMA PIHAK EKSEKUTIF TIM AHLI SERTA KEPALA SKPD MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD TAHUN 2016-2021 TELAH DI BAHAS DENGAN TELITI MULAI DENGAN BAB I SAMPAI DENGAN BAB X UNTUK KEMAJUAN SULAWESI UTARA YANG KITA CINTAI BERSAMA. DAN TELAH DI SEPAKATI UNTUK PELAKSAAN PERUBAHAN-PERUBAHANNYA AKAN ***DISESUAIKAN...***, SEBAGAIMANA HASIL

PEMBAHASAN DILAKUKAN OLEH TIM PENYUSUN DARI PIHAK EKSEKUTIF.

2. MATERI RANCANGAN AWAL RPJMD TAHUN 2016-2021 YANG DIBAHAS OLEH PANITIA KHUSUS DPRD BERSAMA EKSEKUTIF TELAH BERJALAN DENGAN BAIK DAN LANCAR DALAM RANGKA MENYAMAKAN PENDAPAT TERHADAP PENENTUAN ANGKA PREDIKTABEL KEDEPAN KONSEP DATA DASAR DAN KORELASI SERTA PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN VISI DAN MISI.
3. PENYEMPURNAAN TERHADAP MATERI RANCANGAN AWAL RPJMD TAHUN 2016-2021, INI DIMAKSUDKAN AGAR SETELAH DIPERBAIKI DAPAT DITETAPKAN DAN DISETUJUI DALAM RAPAT PARIPURNA UNTUK DI BAHAS PADA TINGKAT SELANJUTNYA SEBAGAIMANA KETENTUAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH SEHINGGA DAPAT DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF UNTUK KEMAJUAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT SULAWESI UTARA.

B. SARAN

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, PANITIA KHUSUS DPRD MENGUSULKAN/MENYARANKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DPRD YANG TERHORMAT INI KIRANYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG RPJMD TAHUN 2016-2021. DAPAT DISETUJUI DAN DITANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN RANCANGAN AWAL RPJMD DALAM RAPAT PARIPURNA, DAN KEDEPANNYA DIBAHAS PADA TINGKAT SELANJUTNYA UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB V
P E N U T U P

DEMIKIANLAH LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016-2021, DENGAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA INSTANSI TERKAIT YANG TELAH MEMBANTU KELANCARAN PEMBAHASAN INI SEHINGGA DAPAT MEMPEROLEH HASIL YANG OPTIMAL UNTUK MEMBUAT SULAWESI UTARA YANG HEBAT DIMATA NASIONAL DAN INTERNASIONAL.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA AKAN MEMBERKATI KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

PAKATUAN WO PAKALAWIREN

WABILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH

WASALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SYALOOM....

MANADO, JUNI 2016

PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA,
PEMBAHAS RENCANA AWAL RPJMD PROVINSI SULAWESI UTARA

K E T U A ,

SEKRETARIS,

DRA. ADRIANA C.
DONDOKAMBHEY,M.SI

JAMES KARINDA, SH, MH

Lampiran IV

Daftar pertanyaan wawancara Penelitian

Kantor Badan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi Sulawesi Utara

1. Bagaimana Tahapan Formulasi kebijakan dalam RPJMD pemerintah provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana Merumuskan masalah-masalah dalam melakukan formulasi kebijakan ?
3. Bagaimana proses menentukan agenda kebijakan dalam RPJMD ?
4. Apakah ada pemilihan alternatif-alternatif dalam merumuskan kebijakan RPJMD ?
5. Bagaimana proses penetapan kebijakan RPJMD ?

Kantor Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Zona Maritim Tengah

1. Apa trend ancaman di laut sulawesi utara menurut Bakamla ?
2. Apakah Bakamla dilibatkan dalam penyusunan RPJMD yang berkaitan dengan rencana kebijakan keamanan maritim ?
3. Apakah bentuk dukungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada Bakamla di zona maritim tengah ?
4. Apakah ada bentuk kerja sama antara pemerintah provinsi Sulawesi Utara dengan Bakamla di zona maritim tengah ?

Kantor Biro Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara

1. Bagaimana Merumuskan masalah-masalah dalam melakukan formulasi kebijakan ?
2. Bagaimana proses menentukan agenda kebijakan dalam RPJMD ?

3. Bagaimana sumber-sumber dukungan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ?
4. Bagaimana komunikasi antar instansi dalam mengimplementasikan kebijakan ini ?
5. Apakah kondisi lapangan tentang sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ini ?
6. Bagaimana kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ini ?
7. Bagaimana implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara di kabupaten talaud
8. Apa saja program pemerintah yang sudah terlaksana sejak di sahkan RPJMD ini
9. Apa program pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun 2017
10. Berapa anggaran pembangunan kawasan perbatasan di provinsi Sulawesi Utara
11. Bagaimana keterlibatan Pemerintah provinsi terhadap program pemerintah pusat di daerah perbatasan provinsi Sulawesi Utara

Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara

1. Bagaimana tahapan RPJMD ini di sahkan oleh DPRD ?
2. Apakah ada transkrip atau dokumen sidang dalam pembahasan RPJMD ini ?